



**LAPORAN TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI XI DPR RI  
KE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
8 s.d 10 MARET 2016**

---

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan Keputusan Rapat Intern Komisi XI DPR RI, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tanggal 8 s.d 10 Maret 2016. Kunjungan Kerja ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengendalian inflasi dan pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana kita ketahui, guna mendukung perkembangan ekonomi daerah yang berkesinambungan dan menjaga kesejahteraan masyarakat, maka sangat penting untuk menjaga tingkat inflasi pada level yang terjaga. Karena jika inflasi itu ringan maka akan memiliki pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat masyarakat bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun apabila inflasi itu tinggi maka keadaan perekonomian akan menjadi lesu, masyarakat menjadi tidak bersemangat dalam bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan melakukan produksi karena harga-harga meningkat dengan cepat.

Dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional yang diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat bahwa inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Triwulan IV Tahun 2015 sebesar 3,28% (yoy). Inflasi ini lebih rendah dari triwulan III Tahun 2015 yang sebesar 7,33% (yoy) dan inflasi tahun sebelumnya sebesar 9,04%. Kondisi ini didorong oleh meredanya tekanan inflasi pada kelompok inti, volatile food, dan administered prices.

Dalam Kunjungan Kerja yang dilakukan, Komisi XI DPR RI ingin mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan inflasi yang terjadi di daerah, tugas dan fungsi dari anggota TPID, mekanisme kerja dan koordinasi yang dilakukan oleh TPID terkait pengendalian inflasi di daerah. Selain itu juga, Komisi XI DPR

RI ingin mengetahui jenis komoditas apa saja yang memberikan pengaruh paling besar terhadap capaian inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain melihat perkembangan inflasi yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan tingkat suku bunga perbankan, Kunjungan Kerja yang dilakukan juga bermaksud untuk mengetahui perkembangan dan realisasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2016 Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun dengan kemungkinan penambahan menjadi Rp120 triliun dengan tingkat suku bunga sebesar 9%. Guna mencapai target tersebut, Pemerintah akan menerapkan beberapa strategi dimana salah satunya adalah menambah jumlah Bank Penyalur KUR. Pemerintah akan memberikan izin kepada 25 bank diluar BPR dari total 118 bank yang ada di Indonesia dalam penyaluran KUR tahun 2016. Adapun syarat bagi tambahan bank penyalur KUR tersebut adalah apabila tingkat kredit bermasalah atau NPL bank tersebut mencapai maksimal 5% untuk kredit UMKM dan memiliki portofolio kredit UMKM paling sedikit 5% dari total kredit. Adapun alokasi penyaluran KUR sebesar Rp100 triliun akan dibagi 65% untuk kredit mikro dan 35% untuk ritel. Pemerintah pun memberikan batasan plafon kredit sesuai kemampuan bank masing-masing.

Untuk mewujudkan target penyaluran KUR pada tahun 2016 tersebut, pengawasan atas pelaksanaan program KUR ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu melalui Kunjunga Kerja yang dilakukan, Komisi XI DPR RI mengharapkan untuk mendapatkan data, informasi dan masukan terkait pelaksanaan KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data, informasi dan masukan tersebut akan menjadi masukan yang berarti bagi Komisi XI DPR RI dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program KUR yang telah berjalan selama ini.

Susunan keanggotaan tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

No.	No. Angg	Nama Anggota	Fraksi	Keterangan
1.	317	Ir. H. Soepriyatno	P. GERINDRA	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi XI
2.	164	Maruarar Sirait, S.IP	PDIP	Anggota
3.	185	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	PDIP	Anggota
4.	196	Eva Kusuma Sundari	PDIP	Anggota
5.	320	Edison Betaubun, SH., MH	P. GOLKAR	Anggota
6.	309	Aditya Anugrah Moha, S. Ked	P. GOLKAR	Anggota
7.	392	Haerul Saleh, SH	P. GERINDRA	Anggota
8.	429	Evi Zainal Abidin, B. Com	P. DEMOKRAT	Anggota
9.	458	H. Muslim Ayub, SH., MM	PAN	Anggota
10.	94	Ir. H. A. Junaidy Auly, MM	PKS	Anggota
11.	541	H.M. Amir Uskara, M. Kes	PPP	Anggota
12.	15	Donny Imam Priambodo, ST. MM	P. NASDEM	Anggota
13.	11	H. Ahmad Sahroni, SE	P. NASDEM	Anggota

## II. INFORMASI DAN TEMUAN

### **A. BANK INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

#### **1. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai luas wilayah 16.424 km<sup>2</sup>, terletak di sebelah timur Pulau Sumatera. Sebelum menjadi Provinsi sendiri, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian memisahkan diri menjadi Provinsi pada tahun 2000.

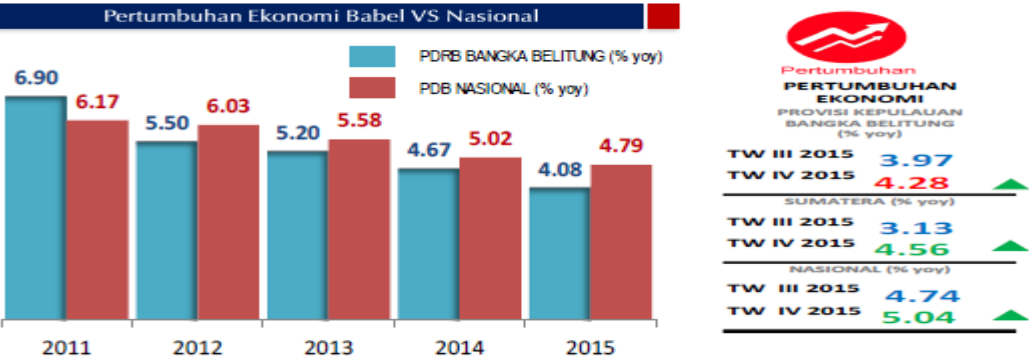
Perekonomian Bangka Belitung yang dominan adalah pada sektor industri pengolahan, pertambangan dan pertanian. Sektor ekonomi tersebut memberikan pangsa yang besar dalam perekonomian Bangka Belitung. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat industri besar milik pemerintah seperti PT. Timah, Tbk, serta beberapa industri perkebunan dan pariwisata milik swasta yang memberikan sumbangsih pada perekonomian di Bangka Belitung.

Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat dua pulau besar yaitu Bangka dan Belitung, dengan dua bandar udara masing-masing bandara Depati Amir di Pangkal Pinang dan H. AS Hanandjoeddin di Tanjungpandan. Sementara itu pelabuhan laut terdapat pelabuhan Pangkalbalam, Tanjung Kalian, Mentok dan Tanjungpandan.

**2. Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

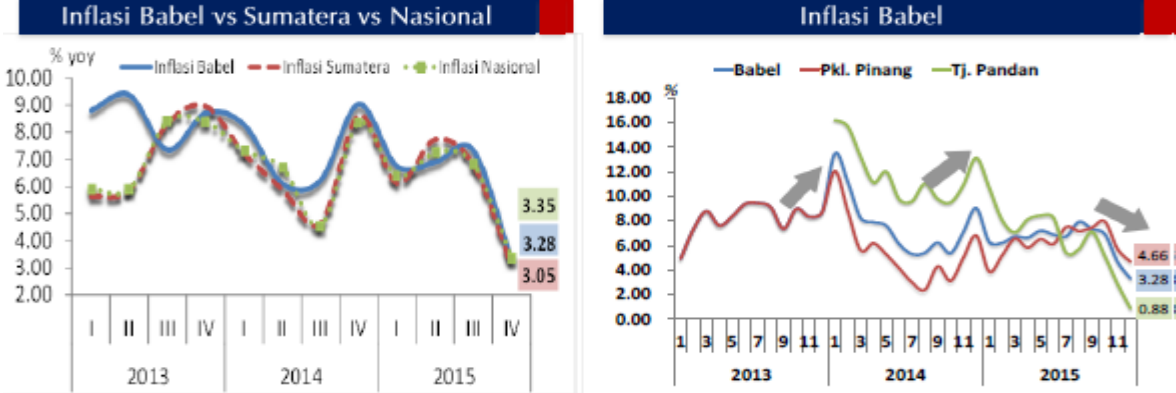
**a. Pertumbuhan ekonomi**

Sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional dan region Sumatera, pertumbuhan ekonomi Babel dalam 5 tahun terakhir juga melambat. PDRB tahun 2015 sebesar 45.961,46 miliar atau tumbuh 4,08% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,67% (yoy).



**b. Tingkat Inflasi**

Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 mencapai 3,28% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah sebesar 4±1% (yoy). Inflasi Babel berada di bawah inflasi nasional sebesar 3,35% (yoy), namun masih diatas inflasi Sumatera sebesar 3,05% (yoy). Inflasi Pangkalpinang tahun 2015 sebesar 4,66% (yoy) dan inflasi Tanjungpandan sebesar 0,88% (yoy).



**c. Perbankan**

Stabilitas sistem keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada akhir 2015 masih terjaga, yang tercermin dari stabilnya indikator fungsi intermediasi dan kualitas kredit yang cukup baik. Namun demikian, perlambatan kredit dan meningkatnya NPL mendekati batas aman seiring dengan perlambatan ekonomi perlu mendapat perhatian.

Aset perbankan tahun 2015 mengalami pertumbuhan walaupun akselerasinya melambat dibandingkan tahun 2014. Jumlah bank yang beroperasi di Babel pada tahun 2015 sebanyak 28 bank yang terdiri dari 24 bank umum dan bank umum syariah serta 4 BPR/S.

### **Perkembangan Dana Pihak Ketiga**

- ✓ DPK triwulan IV 2015 mencapai Rp14,23 triliun atau tumbuh 8,28% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 7,83% (yoy). Pertumbuhan terjadi pada komponen tabungan sedangkan komponen giro dan deposito mengalami perlambatan.
- ✓ Giro tercatat meningkat terbatas sebesar Rp.1,64 triliun, atau tumbuh sebesar 1,44% (yoy) dari 7,91% (yoy) pada triwulan lalu. Deposito tumbuh melambat sebesar 11,40% (yoy) atau senilai Rp.4,78 triliun. Sedangkan tabungan meningkat sebesar Rp.7,81 triliun atau tumbuh 7,95% (yoy).
- ✓ Komposisi DPK : tabungan (54,88%), deposito (33,59%), giro (11,53%).

### **Perkembangan Kredit**

- ✓ Kredit menurut lokasi proyek tercatat sebesar Rp14,26 triliun atau tumbuh 4,53% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar Rp14,48 triliun atau tumbuh 13,23% (yoy).
- ✓ Perlambatan ini terjadi pada kredit produktif dan kredit non-produktif seiring dengan melambatnya perekonomian
- ✓ Perlambatan kredit produktif terjadi pada kredit modal kerja yang berkontraksi sebesar 3,46% (yoy) dari 11,89% (yoy). Sementara untuk kredit investasi sedikit melambat 34,45% (yoy), dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 34,91%. kredit konsumsi tumbuh 6,32% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya sebesar 6,52% (yoy).
- ✓ Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja 51,58%, kredit investasi 16,81% dan kredit konsumsi 31,61%.

### **Perkembangan Kredit**

- ✓ Fungsi intermediasi perbankan pada triwulan laporan mengalami peningkatan, dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) kredit berdasarkan lokasi proyek mencapai 100,21%, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang mencapai 99,98%.
- ✓ Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross perbankan Bangka Belitung tercatat meningkat dari 4,00% pada triwulan sebelumnya yang mencapai 2,82%.
- ✓ Kontribusi tertinggi NPL pada sektor listrik, gas dan air. Sementara sektor pertambangan yang memiliki pangsa kredit terbesar memiliki NPL sebesar 3,01% meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 2,24%

#### **Perkembangan Kredit**

- ✓ Rasio kredit UMKM terhadap total kredit sebesar 24,49%.
- ✓ Pada akhir triwulan IV 2015, penyaluran kredit UMKM mencapai Rp3,49 triliun atau meningkat sebesar 0,86% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 0,26% (yoy).
- ✓ Penyaluran kredit UMKM terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran.
- ✓ Pangsa UMKM pada kredit mikro 21%, kredit kecil 40% dan menengah 39%.

### **3. Outlook Perekonomian Daerah Tahun 2016-2017**

#### **a. Prospek ekonomi Bangka Belitung 2016-2017**

Pertumbuhan ekonomi tahun 2016 diperkirakan meningkat, Pertumbuhan yang lebih tinggi didorong stimulus fiskal terutama pembangunan proyek infrastruktur dan konsumsi yang diperkirakan masih tetap kuat. Sementara itu, investasi diharapkan meningkat seiring dengan implementasi paket kebijakan pemerintah yang mendorong investasi dan stabilitas makroekonomi yang semakin baik. Perekonomian 2016 juga diperkirakan akan diwarnai oleh inflasi yang berada pada sasaran inflasi 2016 yaitu  $4\pm 1\%$ . Sejalan dengan konsumsi RT, kegiatan perdagangan diperkirakan menguat dan penjualan eceran membaik.

#### **b. Peluang dan resiko perekonomian 2016**



### Upside Risk

#### Eksternal

- Kenaikan FFR telah diantisipasi pasar dan diperkirakan relatif moderat
- Harga komoditas yang mulai membaik, adanya dampak positif berlakunya Permendag No.33 Tahun 2015

#### Internal

- Pelonggaran kebijakan moneter, penurunan BI Rate menjadi 7% serta penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) yang diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan
- Konsumsi meningkat seiring dengan membaiknya harga komoditas
- Dampak positif dari Paket-Paket Kebijakan yang mempercepat proses perizinan investasi, dll.
- Hilirisasi industri, insentif bea ekspor dan harga internasional yang rendah bagi ekspor CPO olahan (*value added*)



### Downside Risk

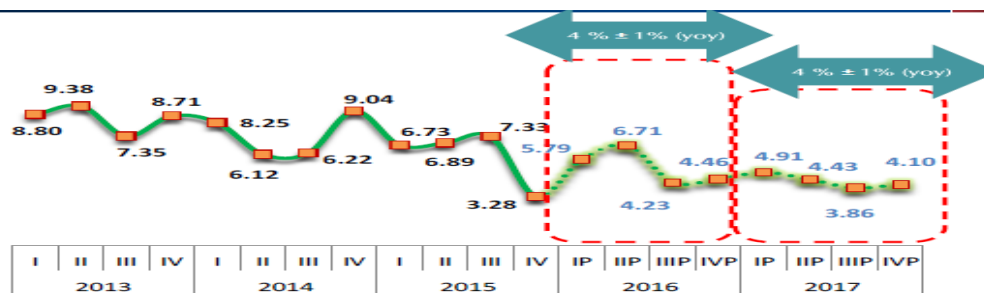
#### Eksternal

- Perbaikan ekonomi global diperkirakan lebih rendah dari perkiraan
- Ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan melambat
- Koreksi harga komoditas CPO, karet, timah yg lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya.
- Volatilitas nilai tukar Rupiah.

#### Internal

- Banjir yang terjadi di awal bulan Februari 2016 mengakibatkan perekonomian terganggu. Sektor perdagangan dan pertanian terkena dampak paling besar
- Kemungkinan terganggunya pembiayaan proyek Pemda sehubungan adanya pengalihan DBH dari tunai ke SBN
- Perkiraan melambatnya belanja modal (*capex*) swasta akibat profit yang menurun di 2015

### c. Proyeksi inflasi 2016-2017



### d. Faktor pendorong dan penahan inflasi

Faktor Pendorong Inflasi	
<b>VF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pergeseran musim panen di daerah pemasok akibat El Nino dan sebagian masih dlm musim tanam.</li> <li>• Intensitas curah hujan yg tinggi mengganggu produksi beras dan bencana banjir.</li> </ul>
<b>AP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak penyesuaian tarif listrik rumah tangga golongan 1.300VA dan 2.200VA.</li> </ul>
<b>CI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya beli masyarakat.</li> <li>• Depresiasi nilai tukar rupiah.</li> <li>• Kenaikan UMP.</li> </ul>
Faktor Penahan Inflasi	
<b>VF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mulai masuknya masa panen cabai merah dan bawang merah.</li> <li>• Perbaikan irigasi dan infrastruktur pangan sbg dampak penguatan sektor pertanian.</li> </ul>
<b>AP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian harga BBM bersubsidi.</li> <li>• Koreksi tarif angkutan kota dan angkutan udara.</li> <li>• Penurunan harga elpiji 12 kg</li> </ul>
<b>CI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan arus barang sbg dampak MEA.</li> <li>• Harga komoditas yang belum menunjukkan perbaikan yg signifikan.</li> <li>• Terjaganya harga emas internasional.</li> <li>• Penurunan harga gas industri</li> </ul>

### 4. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk 8 TPID dengan rincian sebagai berikut:

- 1) TPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 2) TPID Kota Pangkalpinang;
- 3) TPID Kabupaten Belitung (Kota Tanjungpandan);
- 4) TPID Kabupaten Bangka Tengah;
- 5) TPID Kabupaten Bangka;
- 6) TPID Kabupaten Belitung Timur;
- 7) TPID Kabupaten Bangka Selatan; dan
- 8) TPID Kabupaten Bangka Barat.

Berdasarkan Inmendagri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan jasa di Daerah, Tugas dan Kewajiban TPID Babel adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya bahan pangan pokok.
2. Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya bahan pangan pokok.
3. Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
4. Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga bahan bakar minyak, tarif tenaga listrik, harga LPG, upah minimum, bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabuhan, dan tarif angkutan.
5. Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Melakukan koordinasi yang intensif diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu wilayah kerjasama dengan SKPD di wilayah lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok.

Tugas, fungsi dan mekanisme kerja anggota TPID Babel adalah sebagai berikut:





Berdasarkan kelompok pembentuk inflasi, inflasi Babel sangat dipengaruhi oleh pergerakan kelompok *volatile food*. Sementara kelompok *administered price* mendorong tingkat inflasi pada tahun 2015 ke level yang lebih rendah sejak mencapai puncaknya pada akhir tahun 2014. Komoditas penyumbang inflasi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

<b>Volatile Food</b>	<p><b>Top 5 komoditas yang memiliki bobot tinggi dan frekuensinya sering muncul</b> sebagai pemberi andil inflasi tinggi (2013-2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Beras, bobot inflasi 4,94%</li> <li>▪ Daging Ayam Ras bobot inflasi 1,18%</li> <li>▪ Kembang/ Gembung/ Banyar/ Gembolo/ Aso-Aso, bobot inflasi 0,66.%</li> <li>▪ Cumi-cumi, bobot inflasi 0,71%</li> <li>▪ Selar/Tude, bobot inflasi 0,34%</li> </ul>
<b>Administered Prices</b>	<p>Komoditas Administered Prices spesifik daerah berdasarkan bobot dan frekuensi pada 2013-2015,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tarif Listrik bobot inflasi 0,08%</li> <li>▪ Bahan Bakar rumah tangga bobot inflasi 0,05%</li> <li>▪ Bensin bobot inflasi 0,02%</li> <li>▪ Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan bobot inflasi 0,02%</li> <li>▪ Angkutan udara bobot inflasi 0,01%</li> </ul>
<b>Inti</b>	<p>Komoditas Inti spesifik daerah berdasarkan bobot dan frekuensi pada 2013-2015, sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikan Bulat, bobot inflasi 0,46%</li> <li>▪ Ikan Sotong, bobot inflasi 0,18%</li> <li>▪ Ayam nuggets, bobot inflasi, 0,10%</li> <li>▪ Singkur, bobot inflasi, 0,055</li> <li>▪ Tenggiri, bobot inflasi 0,01%</li> </ul>

Tantangan pengendalian inflasi Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

### Struktur Pasar

- Struktur pasar komoditas pangan terkonsentrasi di pedagang besar dan grosir (memiliki pengaruh kuat dipasokan dan harga)
- Diindikasikan merupakan pasar oligopoli, namun di level pedagang eceran merupakan pasar persaingan sempurna.

### Pola Distribusi

- Pola distribusi cenderung bervariasi dan tidak terpaku pada satu jalur yang baku, sehingga meminimalkan terbentuknya perilaku kartel.
- Resiko perilaku kartel tetap dapat muncul melalui adanya informasi harga acuan dari salah satu pelaku pasar yang kemudian dijadikan sebagai acuan pelaku pasar lainnya.

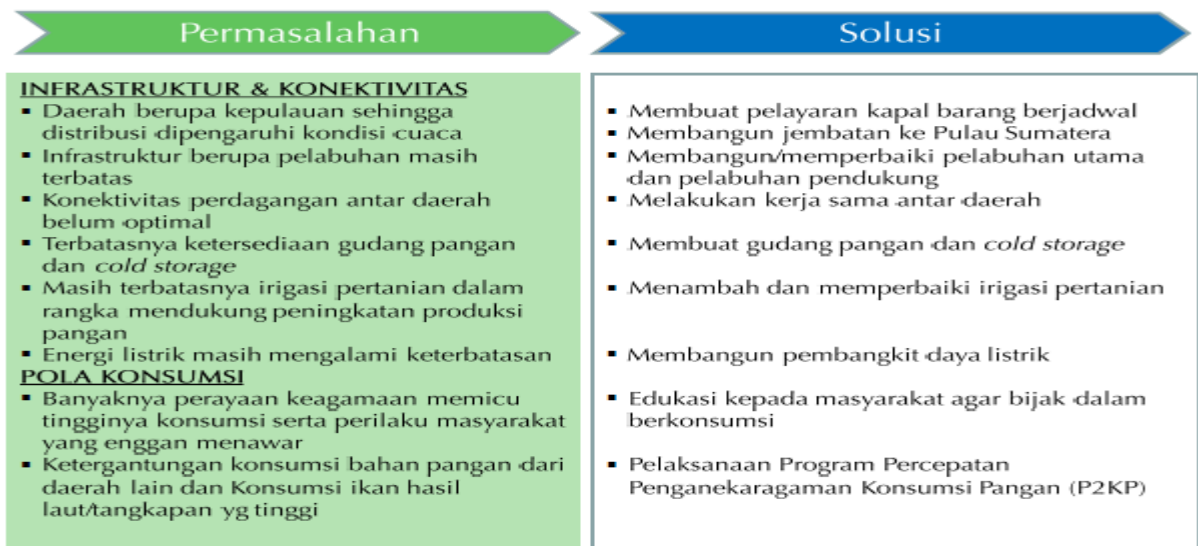
### Perilaku Pembentukan Harga

- Penetapan harga secara umum baik ditingkat produsen maupun ditingkat pedagang, berdasarkan harga tertinggi di pasar dan tingkat harga pesaing serta mempertimbangkan kondisi pasokan dan permintaan.
- Tidak terlalu memperhatikan struktur biaya yang mereka tanggung dan kompensasi margin keuntungan yang diinginkan.
- Pelaku pasar juga memasukkan ekspektasi inflasi

\*) Berdasarkan Kajian Pemetaan Struktur Pasar & Jalur Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi Kota Pangkalpinang – Bank Indonesia dan UBB Tahun 2013, yang meneliti 5 komoditas yakni Beras, Gula Pasir, Cabe Merah, Daging Ayam Ras, Bawang Merah

Permasalahan dan solusi pengendalian inflasi di Provinsi Babel adalah sebagai berikut:

Permasalahan	Solusi
<p><b>PRODUKSI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketergantungan pasokan pangan dari daerah lain</li><li>▪ Produksi ikan tangkapan fluktuatif tergantung musim</li><li>▪ Keterbatasan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan</li></ul> <p><b>DISTRIBUSI &amp; TATA NIAGA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rantai distribusi relatif panjang dan tata niaga kurang efisien serta struktur pasar cenderung oligopolis.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Peningkatan produksi pangan secara ekstensifikasi dan intensifikasi</li><li>▪ Pengembangan sektor peternakan</li><li>▪ Pengembangan perikanan budidaya</li><li>▪ Optimalisasi perikanan tangkap</li><li>▪ Dukungan pembiayaan kepada sektor pertanian dan perikanan</li><li>▪ Membuat kajian jaringan distribusi dan tata niaga komoditas penyumbang inflasi</li><li>▪ Penyesuaian ketentuan untuk mendukung kelancaran distribusi dan efisiensi tata niaga</li><li>▪ Pengembangan pasar tradisional, pasar induk, pasar sentra produksi pertanian serta tempat pelelangan ikan</li><li>▪ Pemanfaatan teknologi informasi untuk pemantauan distribusi komoditas pangan</li><li>▪ Penyusunan <i>Early Warning System</i> beserta SOP mengatasi gejolak harga pangan</li></ul>
Permasalahan	Solusi
<p><b>INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terbatasnya data/informasi harga, produksi, stok dan konsumsi bahan pangan strategis yang dapat dimanfaatkan oleh pengambilan kebijakan, produsen dan konsumen</li><li>▪ Belum optimalnya kegiatan pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat</li></ul> <p><b>KELEMBAGAAN TPID</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Belum optimalnya kinerja dan kerjasama TPID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ataupun TPID antar Provinsi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tersediannya informasi harga harian komoditas pangan strategis</li><li>▪ Pembuatan PIHPS* yang memuat informasi harga konsumen dan produsen</li><li>▪ Diseminasi informasi harga kepada konsumen dan produsen hasil pangan</li><li>▪ Program komunikasi kepada masyarakat untuk merubah gaya dan pola konsumsi</li><li>▪ Program peningkatan komitmen dan kapabilitas anggota TPID serta penguatan koordinasi antar TPID</li><li>▪ Kerja sama antar daerah baik dalam wilayah Provinsi maupun dengan TPID Provinsi lain</li></ul> <p>* Pusat Informasi Harga Pangan Strategis</p>



## 5. Rekomendasi Kebijakan Bank Indonesia Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Babel

### Memberikan rekomendasi

1. Mendorong pengurangan ketergantungan pasokan pangan al. melalui program swasembada pangan dengan pencetakan lahan sawah baru (ekstensifikasi);
2. Mendorong peningkatan produksi pangan (intensifikasi) melalui teknologi budidaya modern, pengaturan pola tanam, penyediaan pupuk dan alsintan yang mencukupi, serta pembinaan dan pelatihan kepada petani;
3. Mendorong terbentuknya stok pangan yang mencukupi, melalui pembangunan fasilitas pergudangan dan *cold storage* serta pembentukan cadangan pangan daerah;
4. Mendorong program ketahanan pangan dan penganekaragaman konsumsi bahan pangan masyarakat;
5. Mendorong perbaikan pola distribusi dengan; usulan agar Babel masuk dalam Program Tol Laut, perbaikan infrastruktur, saran dan layanan bongkar muat pelabuhan, dan kerja sama dengan stakeholder terkait;
6. Melakukan efisiensi tata niaga melalui tersedianya data untuk analisis kebijakan (data produksi, surplus defisit komoditas), kerja sama antar daerah, ketersediaan informasi hasil produk pertanian untuk mengurangi *asymetric information*, penghapusan aturan yang membebani pelaku usaha, mengkaji pendirian terminal agribisnis dan TPI di sentra produksi;
7. Mendorong terbentuknya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan, produsen, maupun konsumen;

8. Melakukan program edukasi dan komunikasi kepada masyarakat untuk mengelola ekspektasi inflasi masyarakat.

#### **Upaya real dalam pengendalian inflasi**

1. Pembentukan klaster cabai di Belitung dan rencana pembentukan klaster bawang merah di Bangka Tengah;
2. Mendukung program ketahanan pangan melalui program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dengan memanfaatkan pekarangan rumah antara lain P2KP di Bangka Barat dan Pangkalpinang;
3. Pembuatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis berupa pembuatan website dan bantuan monitor TV;
4. Meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui edukasi keuangan ke koperasi dan nelayan;
5. Talk show melalui media massa dan elektronik dengan mendorong masyarakat agar bijak dalam konsumsi.

#### **6. Rekomendasi/rencana aksi TPID Babel**

- Mendorong kerjasama antar daerah;
- Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS);
- Penghapusan retribusi ikan di Tempat Pelelangan Ikan;
- Melaksanakan operasi pasar pada momen tertentu seperti puasa dan lebaran.

#### **7. Aksi kegiatan TPID Tahun 2015**

Selama tahun 2015 terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan TPID yang berkontribusi positif terhadap pengendalian inflasi daerah antara lain:

1. TPID Bangka Tengah melalui program penjualan daging sapi subsidi kepada rumah tangga miskin (RTM) selama bulan Ramadhan. RTM hanya membayar Rp40 ribu per kg daging dan kegiatan ini telah direalisasikan sebanyak 5.000 kg selama 2015.
2. Selain itu, pada momen tertentu seperti bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri TPID Kabupaten/Kota melalui SKPD terkait melakukan melakukan operasi pasar dan sidak pasar.
3. Pelindo dan Bulog sebagai anggota TPID juga telah membantu masing-masing melalui layanan prioritas bongkar muat pelabuhan untuk komoditas sembako dan penyaluran beras raskin secara tepat waktu.

4. Terkait program komunikasi sosialisasi kepada masyarakat, TPID Pangkalpinang telah secara aktif mempublikasikan informasi harga kebutuhan masyarakat dan program edukasi masyarakat di media massa.

## 8. Program Pemerintah Daerah dan Bank Indonesia

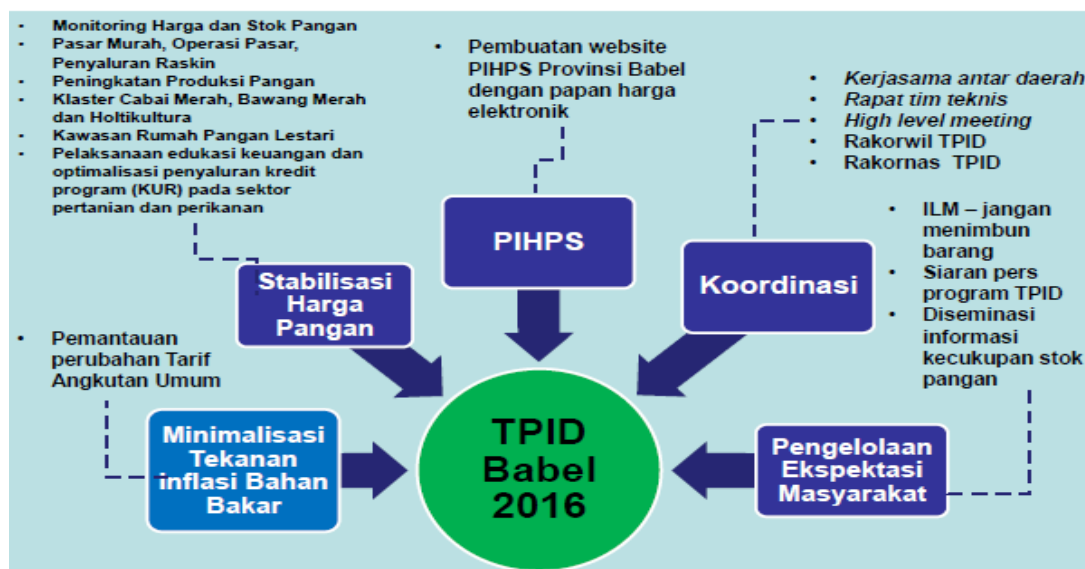
1. Program pencetakan sawah baru dalam rangka mendukung program swasembada pangan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi.
2. Program ketahanan pangan melalui program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) dengan memanfaatkan pekarangan rumah juga dapat berkontribusi dalam pengendalian inflasi daerah. Bank Indonesia dalam hal ini juga ikut mendukung dan berperan melalui pembentukan klaster cabai di Belitung dan dukungan pembiayaan P2KP pemanfaatan pekarangan di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang senilai lebih dari Rp1 miliar.

## 9. Evaluasi pelaksanaan program TPID

1. Belum optimalnya kinerja TPID yang sudah terbentuk >> Peningkatan komitmen seluruh anggota TPID; rapat koordinasi antar TPID; studi banding ke TPID yang sudah berhasil; dan capacity buliding berkelanjutan.
2. Koordinasi antar TPID belum optimal dan bersifat sporadis. >> *Rapat koordinasi antar TPID secara periodik; kerja sama antar daerah a.l. daerah non-sampling inflasi penghasil pangan dengan kota sampling inflasi yang mensuplai barang konsumsi rumah tangga; kerja sama dengan TPID Provinsi lain maupun dengan lembaga lainnya (BUMD, Bulog, Pertamina, Pelindo)*
3. Perencanaan belum fokus, terencana, sistematis dan terpadu >> *Perencanaan pengendalian inflasi disusun dengan time frame jangka pendek-menengah-panjang; diselaraskan untuk mencapai sasaran inflasi jangka pendek-menengah yaitu 2015-2017 sebesar  $4\% \pm 1\%$  dan 2018  $3,5\% \pm 1\%$ ; meliputi aspek perbaikan produksi, distribusi, infrastruktur, kelembagaan, pengembangan SDM dan program Sosialisasi /komunikasi (melalui Roadmap Pengendalian Inflasi).*
4. Program kerja SKPD sebagai anggota TPID belum *link* dan selaras pengendalian inflasi>> *Perencanaan program kerja SKPD perlu mengacu kepada perencanaan pengendalian inflasi jangka pendek-menengah-panjang (butir 3 di atas).*

5. Belum ada mekanisme tindak lanjut/SOP bila ada lonjakan harga >> perlu *earlywarning system* bila ada lonjakan harga komoditas penting serta mekanisme tindak lanjutnya
6. Pemantauan harga masih terbatas dan belum semua Kota/Kabupaten melakukannya, selain itu jumlah komoditas yang disurvei masih terbatas. >> *Komoditas yang disurvei diperluas dan diupload ke website PIHPS Provinsi Babel (nantinya). Informasi harga ini digunakan sebagai bahan monitor pencapaian inflasi periode berjalan serta untuk diseminasi kepada masyarakat*
7. TPID non-kota sampel penghitungan BPS mengalami kesulitan dalam memantau pencapaian inflasi karena tidak tersedianya data inflasi daerah. >> *TPID non-sampling inflasi dapat melakukan pemantauan harga komoditas utama di pasar-pasar dan hasilnya dijadikan proxy pencapaian inflasi.*

#### 10. Fokus program TPID Babel Tahun 2016



#### 11. Strategi TPID Babel dalam mengantisipasi kenaikan harga akibat kenaikan permintaan dan kebijakan pemerintah

- a. Melaksanakan operasi pasar;
- b. Penyaluran bahan pokok bersubsidi;
- c. Pengendalian dampak lanjutan kenaikan BBM

## B. OTORITAS JASA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

### 1. Realisasi dan perkembangan KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BABEL	2011	2012	2013	2014	2015	Pertumbuhan 2014-2015	% yoy 2014-2015
	Desember	Desember	Desember	Desember	Desember		
Aset (Juta Rp)	10.795.284	13.493.187	13.262.473	13.661.283	14.830.309	1.169.026	8,56%
Kredit (Juta Rp)	4.830.043	5.502.042	7.813.352	9.106.332	9.778.886	672.554	7,39%
Modal Kerja (Juta Rp)	2.443.418	2.602.938	4.067.500	4.933.688	5.094.324	160.636	3,26%
Investasi (Juta Rp)	544.355	418.123	663.863	770.124	895.872	125.748	16,33%
Konsumsi (Juta Rp)	1.842.270	2.482.981	3.081.989	3.402.520	3.788.677	386.157	11,35%
UMKM (Juta Rp)	2.225.300	2.604.256	2.989.919	3.213.724	3.306.539	92.815	2,89%
DPK (Juta Rp)	10.880.370	12.746.785	11.828.017	13.948.863	15.691.582	1.742.719	12,49%
Giro (Juta Rp)	1.793.653	2.302.293	1.478.279	1.680.128	1.746.703	66.575	3,96%
Tabungan (Juta Rp)	5.950.970	7.153.245	7.049.112	7.648.223	8.454.075	805.852	10,54%
Deposito (Juta Rp)	3.135.746	3.291.246	3.302.626	4.620.512	5.490.804	870.292	18,84%
LDR (%)	44,39%	43,16%	66,06%	65,28%	62,32%	(0)	-4,54%
NPL (Juta Rp)	27.480	50.368	102.279	147.766	234.852	87.086	58,94%
NPL (%)	0,57%	0,92%	1,31%	1,62%	2,40%	0	48,00%
Jaringan Kantor*	115	123	123	175	176	1	0,57%

Aset perbankan di Bangka Belitung pada Desember 2015 meningkat sebesar Rp1,17 Triliun (8,56%) menjadi Rp14,8 Triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan aset tersebut didukung oleh peningkatan kredit sebesar Rp672,5 miliar (7,39%) dan peningkatan DPK sebesar Rp1,7 Triliun (12,49%).

### 2. Perkembangan kinerja KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Secara umum kinerja baki debit KUR menurun 11,92% dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu dan baki debit turun Rp22,7 miliar. Secara umum NPL KUR membaik kecuali untuk Bank Mandiri dan Bank Sumsel Babel yang mengalami perbaikan rasio NPL.

Bangka Belitung												Dalam jutaan	
Nama Bank	Debitur			Plafond			Baki Debet			NPL%			
	2014	2015	Prb (%)	2014	2015	Prb (%)	2014	2015	Prb (%)	2014	2015	Prb (%)	
BRI	6.375	7.610	19,37%	205.858	170.516	-17,17%	142.936	126.896	-11,22%	2,58	1,63	-36,82%	
BRI (Mikro)	6.021	7.323	21,62%	140.425	115.722	-17,59%	87.483	88.759	1,46%	2,61	0,59	-77,39%	
BRI (Retail)	354	287	-18,93%	65.433	54.794	-16,26%	55.453	38.137	-31,23%	2,54	4,06	59,84%	
BNI	73	112	53,42%	7.514	15.585	107,41%	2.316	14.392	521,42%	19,46	0,06	-99,69%	
Bank Mandiri	3.002	3.229	7,56%	139.100	148.660	6,87%	35.300	21.910	-37,93%	1,22	4,67	282,79%	
Bank Sumsel Babel	211	116	-45,02%	15.398	8.771	-43,04%	9.863	4.568	-53,68%	1,35	9,07	571,85%	
Bank Syariah Mandiri	4	4	0,00%	450,00	450,00	0,00%	276,56	193,42	-30,06%	0,00	0,00	0,00%	
<b>Total</b>	<b>9.665</b>	<b>11.071</b>	<b>14,55%</b>	<b>368.320</b>	<b>343.982</b>	<b>-6,61%</b>	<b>190.691</b>	<b>167.960</b>	<b>-11,92%</b>	<b>2,47</b>	<b>2,09</b>	<b>-15,14%</b>	

### **3. Kendala yang dihadapi**

Faktor-faktor yang menjadi kendala bagi para calon debitur KUR dalam mengakses program KUR antara lain sebagai berikut:

1. Sulitnya para pengusaha UMKM untuk memenuhi persyaratan kredit dari bank (misal : Laporan Keuangan, TDP, NPWP, SIUP).
2. Belum tersosialisasikannya tata cara pembuatan NPWP kepada pengusaha UMKM di daerah.
3. Waktu penyaluran KUR 2015 yang sangat singkat (Akhir Agustus-Desember 2015).
4. Belum meratanya informasi mengenai keberadaan KUR kepada para pelaku UMKM terutama pengusaha di Daerah.
5. Anggapan yang salah mengenai KUR sebagai program kredit usaha yang dananya tidak perlu dikembalikan. Hal ini mengakibatkan NPL KUR menjadi tinggi

### **4. Peningkatan akses pendanaan bagi peserta KUR**

Langkah-langkah yang ditempuh oleh OJK dalam membantu meningkatkan akses pendanaan bagi peserta KUR adalah sebagai berikut:

1. OJK KR 7 Sumbagsel telah merekomendasikan Bank Sumsel Babel untuk menjadi bank penyalur KUR tahun 2016. Diharapkan dengan BSB menjadi penyalur KUR dapat meningkatkan potensi bagi UMKM di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
2. Pembentukan Program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) yang merupakan inisiatif OJK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertujuan meningkatkan pembiayaan di sektor Kelautan dan Perikanan agar terus bertumbuh serta mendorong perluasan akses masyarakat terhadap Sektor Jasa Keuangan yang bisa juga menjadi sasaran program KUR untuk usaha kemaritiman.
3. Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk lembaga jasa keuangan.
4. Pembentukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) untuk mensinergikan industri jasa keuangan dalam mendorong inklusi keuangan



## 5. Pengawasan dan pengaturan

OJK melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap pelaksanaan Program KUR dengan melakukan beberapa hal yaitu:

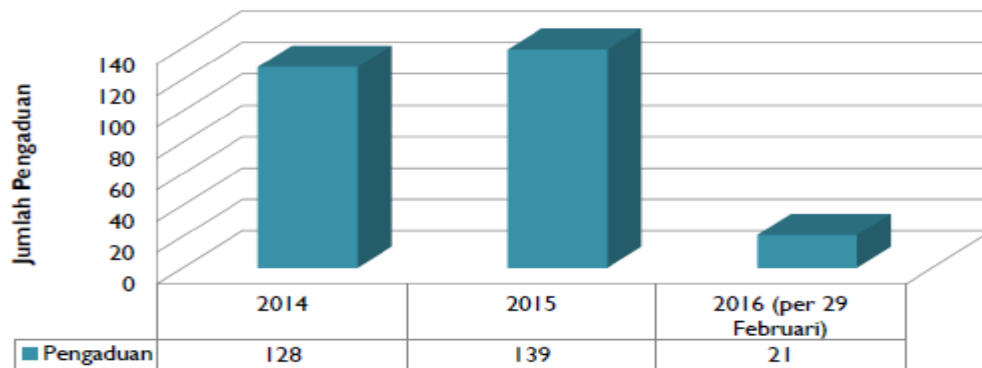
- Dalam melakukan pemeriksaan bank di wilayah KR 7, dilakukan sampel terhadap debitur dengan skema KUR untuk memastikan kesesuaian pemenuhan persyaratan penerima KUR dan juga ketepatan penilaian kualitas kredit KUR;
- Pemantauan berkala terhadap penyaluran KUR di wilayah kerja OJK;
- Mengkaji dan merekomendasikan bank yang layak sebagai penyalur KUR.

## 6. Perlindungan Konsumen

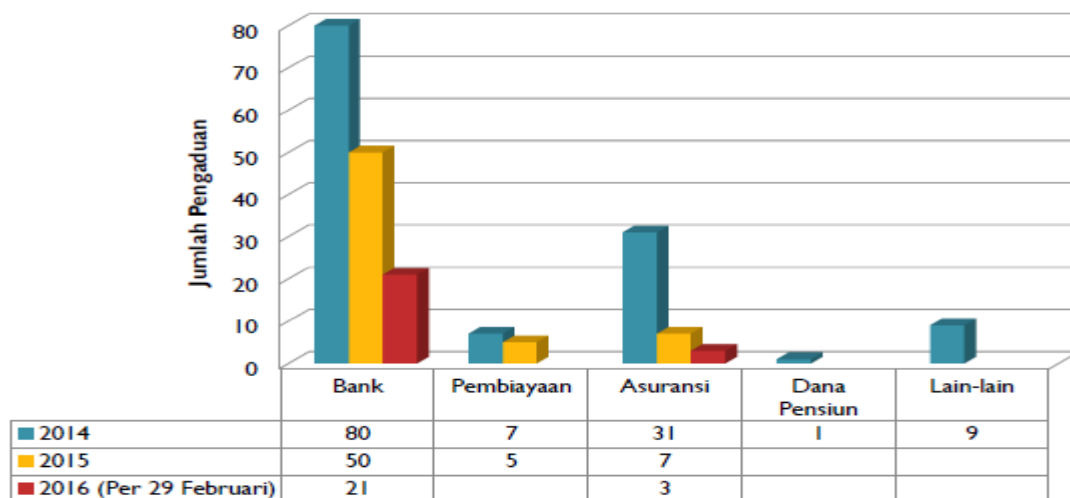
Terkait dengan perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK juga menerima pengaduan dari konsumen peserta KUR yang merasa dirugikan sebagai berikut:

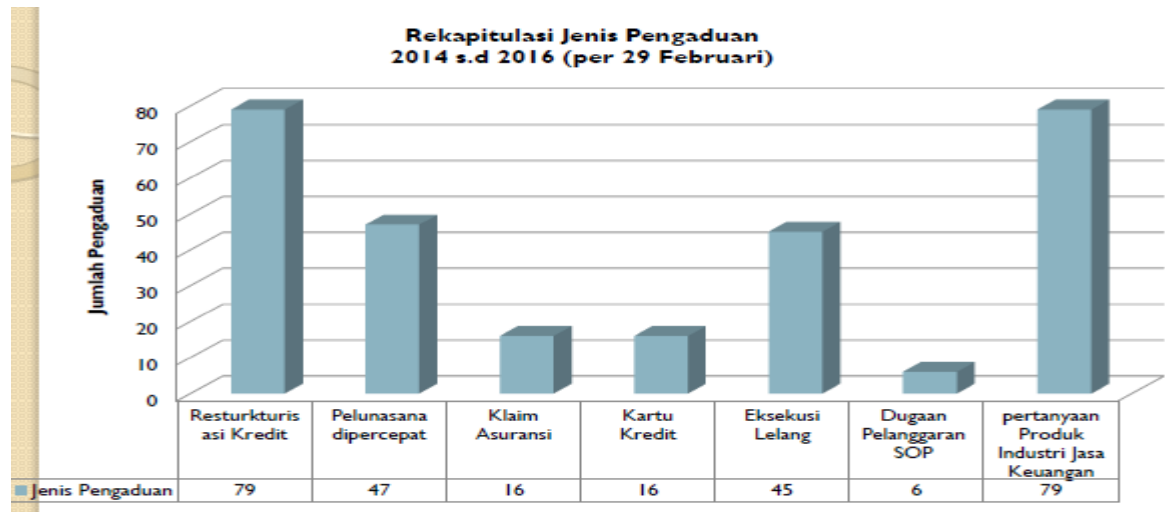
- Jumlah pengaduan konsumen KR 7 – 2014 s.d 2016 (posisi Februari)

**Rekapitulasi Pengaduan Konsumen**



- Pengaduan konsumen per industri jasa keuangan





## II. SARAN DAN MASUKAN

Dalam Kunjungan Kerja yang dilakukan terdapat beberapa saran dan masukan yang berasal dari para mitra kerja Komisi XI DPR RI yaitu sebagai berikut:

1. Terkait program KUR, OJK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan beberapa masukan sebagai berikut:
  - a. Skema KUR yang diberikan agar lebih flexible sesuai bisnis yang akan dibiayai, seperti tahapan installmen kredit tanaman keras atau tanaman hortikultura yang memiliki karakteristik yang khusus.
  - b. Jangka waktu KUR diperpanjang terutama untuk calon debitur kredit investasi.
  - c. Mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi Kredit Usaha Rakyat Provinsi Sumatera Selatan yang telah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 84/KPTS/IV/2016 tanggal 21 Januari 2016.
  - d. Bank penyalur KUR agar dapat melaporkan pencapaian KUR secara bulanan kepada OJK untuk pemantauan yang lebih efektif.
  - e. Usulan dari Perbarindo agar BPR diberikan kesempatan sebagai penyalur KUR.
2. Dari kalangan akademisi, Rektor Universitas Bangka Belitung menyampaikan masukan terkait peningkatan pembangunan daerah yakni agar strategi pembangunan daerah yang menurun dapat diantisipasi dengan melaksanakan strategi pembangunan ekonomi pasca timah dan memanfaatkan potensi karet yang ada serta mulai berfokus pada *natural resources* dan bukan pada *human resources*.

3. TPID Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan harapan agar Komisi XI DPR RI dapat turut serta mendorong pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di Provinsi Bangka Belitung diantaranya pembangunan pelabuhan tanjung berikat dan pelabuhan sungai telang.
4. SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan masalah penyerapan anggaran yang disebabkan adanya aturan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 298 ayat (5) huruf d. Aturan Undang-Undang dimaksud menyebabkan adanya anggaran yang seharusnya digelontorkan kepada masyarakat harus dikembalikan dan tidak dapat disalurkan kepada Gabungan Kelompok Tani yang tidak berbadan hukum.
5. SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyampaikan harapan agar CSR perbankan dapat lebih difokuskan kepada kabupaten/kota yang memiliki potensi komoditas penyebab inflasi.

### **III. TINDAK LANJUT HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan informasi dan permasalahan yang diperoleh oleh Tim Kunjungan Kerja Spesifik pada saat melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tim Kunjungan Kerja menyampaikan beberapa rekomendasi untuk ditindak lanjuti sebagai berikut:

- a. Komisi XI DPR RI meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk terus meningkatkan kreativitas-kreativitas baru untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru.
- b. Komisi XI DPR RI meminta agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendirikan Balai Latihan Kerja sebagai sarana pelatihan untuk meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia dan meningkatkan lapangan kerja.
- c. Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia untuk memperhatikan sektor ekonomi baru guna menciptakan lapangan kerja baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Komisi XI DPR RI meminta kepada perbankan untuk dapat memanfaatkan program CSR untuk membangun ekonomi kreatif dengan menciptakan sektor ekonomi baru yang meningkatkan lapangan kerja agar tidak terfokus pada timah.
- e. Terkait kendala dan permasalahan yang telah disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisi XI DPR RI akan segera melakukan pembahasan lanjutan dalam rapat-rapat Komisi XI DPR RI dengan kementerian terkait/pemerintah agar kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.

### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami mengharapkan berbagai data dan informasi yang diperoleh didalam laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Komisi XI DPR RI.

**Jakarta, Maret 2016**

**TIM KUNJUNGAN KERJA KOMISI XI DPR RI  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**Ketua,**

**ttd**

**Ir. H. SOEPRİYATNO**